PEMERINTAH KOTA SEMARANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
"TIRTA MOEDAL"
Alamat : Jl. Kelud Raya Semarang, Kode Pos : 50237
Telp. (024) 8315514 Fax. 8314078 Email : pdam@pdamkotasmg.co.id

Semarang, 22 – 01 – 2026.

Nomor : 690/49/2026
Sifat :
Lampiran :
Perihal : ~~Informasi Publik~~

~~Kepada~~
Yth. Direktur Lembaga Perhimpunan PATTIROS
Jl. Dinar Mas XII No 18, Meteseh
di -
SEMARANG

1. Memperhatikan Surat dari Direktur Lembaga Perhimpunan PATTIROS kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PDAM Kota Semarang Nomor 001/E/SPm/BP-LPPS/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Permohonan Informasi Publik.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dapat kami sampaikan sebagai berikut :
   a. Bahwa pilar hidran yang terletak di jalan/ area/ wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang tidak tercatat dalam daftar inventaris Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang. Berdasarkan keterangan dari Badan Pengelola dan Aset Daerah Kota Semarang pada pertemuan rapat tanggal 12 Januari 2026 bertempat di Dinas Pemadam Kebakaran bahwa pilar hidran tersebut tercatat pada aset Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Kantor Kecamatan Pemerintah Kota Semarang.
   b. Bahwa pada prisnsipnya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang terbatas pada kewenangan jaringan pipa dan suplai air di titik pilar hidran. Kewenangan pengelolaan terletak pada Instansi yang tercatat sebagai pemilik aset pilar hidran sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan.
   c. Bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang tidak memiliki mekanisme dan anggaran pemeliharaan hidran dikarenakan bukan pemilik aset pilar hidran. Berdasarkan hasil pertemuan rapat tanggal 12 Januari 2026 bertempat di Dinas Pemadam Kebakaran Evaluasi kedepan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang siap dalam mendukung pengecekan pilar hidran di Kota Semarang sebagai langkah untuk memilah pilar hidran yang masih berfungsi atau yang sudah tidak berfungsi.

Badan Pengelola dan Aset Daerah Kota Semarang memberikan saran terkait pilar yang sudah tidak berfungsi untuk dilakukan penghapusan aset. Rencana kedepan penambahan pilar hidran yang dilakukan oleh Instansi terkait demi mengganti pilar hidran yang sudah tidak berfungsi dengan memperhatikan peta jaringan pipa milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang.

3. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Tirta Moedal Kota Semarang
Direktur Utama

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
PERUMDA AIR MINUM TIRTA MOEDAL

Dr. Ir. Ady Setiawan, S.H., M.H., M.M., M.T.

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Pemuda No. 148, Semarang 50132; Tel. (024) 3515945;
Laman www.disperkim.semarangkota.go.id, Pos-el dpkp.smg@gmail.com

10 Februari 2026

Nomor : B/111/300.2.10/II/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Informasi Publik

Yth. Direktur Perhimpunan Pattiros
Jl. Dinar Mas XII No. 18 Kelurahan Meteseh, Tembalang
di -
SEMARANG

Dasar : Surat dari Perhimpunan Pattiros Nomor : 003/E/SPm/BP-LPPs/II/2026 tanggal 4 Februari 2026 perihal : Permohonan Informasi Publik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah kami inventarisasi di lapangan ada beberapa hidran yang berada di lokasi Rumuah Susun, namum hidran tersebut belum tercatat dalam inventaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, adapun data sebagai berikut :

No	Nama Rusun	Jumlah		Status Fungsi	
		Hidran	APAR	Hidran	APAR
1	Bandarharjo	-	15	-	Berfungsi
2	Plamongansari	-	10	-	Berfungsi
3	Kudu	9	57	Tidak Diketahui	Berfungsi
4	Kaligawe	22	100	Tidak Diketahui	Berfungsi
5	Sawah Besar	4	74	Tidak Diketahui	Berfungsi
6	Karangroto Lama	-	4	-	Berfungsi
7	Karangroto Baru	36	15	Tidak Diketahui	Berfungsi
8	Jrakah	10	7	Tidak Diketahui	Berfungsi
9	Pekunden	1	3	Tidak Diketahui	Berfungsi
10	Pondok Boro	-	5	-	Berfungsi

Demikian data ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

Ir. MURNI EDIATI, S.T., M.T.
Pembina Tk. I / IV-b
NIP 197603302002122006

Tembusan :
1. Kepala Dinas Kebakaran Kota Semarang;
2. Pertinggal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan Madukoro Raya Nomor. 7, Krobokan, Semarang Barat 50144,
Telepon (024) 76433969, Faksimile (024) 76433969.
Laman: dpu.semarangkota.co.id, Posel dpu.smgkota@gmail.com

11 Februari 2026

Nomor : B/1019/000/II/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 4 lampiran
Hal : Surat Balasan Permohonan Informasi Publik

Yth.
Bapak/Ibu Pengurus Perhimpunan PATTIROS
Jl. Dinar Mas XII No.18 Kel. Meteseh, Tembalang, Semarang

Dasar
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Dengan Hormat,

Dengan ini kami memberitahukan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Pada Tahun 2019 saat selesainya Revitasilasi Kota Lama yang dilaksanakan oleh Kementrian PUPR, Pemerintah Kota Semarang Mendapat Hibah Fisik atas Revitalisasi Kawasan Kota Lama dan pada saat Hibah tersebut Pemerintah Kota Semarang mencatatan aset berupa Hydrant di Kawasan Kota Lama dalam hal ini di Jl. Let Jend Suprapto di Aset Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebanyak 10 Hydrant dan 10 Kran Hydrant (Lokasi titik hydrant dapat dilihat pada lampiran surat ini).

Mengingat Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang tidak memiliki kewenangan dalam pemeliharaan hydrant-hydrant tersebut, sehingga Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang TIDAK PERNAH menganggarkan Pemeliharaan atas Hydrant-hydrant tersebut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Perlu Kami sampaikan bahwa pada saat ini hydrant-hydrant tersebut sudah kita lakukan pelimpahan pencatatan Aset ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sebagaimana dalam lampiran surat berikut ini.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala,



SUWARTO, S.E., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19670612200031006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Dr. Wahidin No. 118, Jatingaleh, Candisari, Kota Semarang 50254
Telepon (024) 8412180, Posel disdik@semarangkota.go.id
Laman www.disdiksmg.semarangkota.go.id

Semarang, 18 Februari 2026

Nomor : B/4911/000.8.3.3/II/2026
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Permohonan Informasi LPKAN-RI

Yth.
Ketua Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Republik Indonesia
di -
SEMARANG

Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
d. Surat Permohonan Informasi Publik dari Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia nomor 212/Sek-Ber/Klarifikasi/02-2026 tanggal 2 Februari 2026 perihal Klarifikasi/Audiensi Terkait Pengadaan Barang dengan Anggaran Dana BOS dan Dana BOSP TA 2023-2025 yang ditujukan kepada Kepala SMP Negeri 23 Semarang.

Berkaitan dengan surat dari Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia pada huruf d di atas, berdasarkan SOP Dinas Pendidikan Kota Semarang nomor 067.2/SKR-UM-18/DISDIK/2025 tentang Permohonan Informasi Publik di Satuan Pendidikan, bahwa permohonan informasi publik pada satuan pendidikan ditujukan langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang selaku PPID Pembantu.

Berkaitan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 27 ayat 4, menyebutkan bahwa: "Permohonan Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia."

Sehubungan hal tersebut, permohonan informasi publik yang dikirim belum memenuhi persyaratan. Mohon dalam permohonan informasi publik saudara dengan nomor 212/Sek-Ber/Klarifikasi/02-2026, segera dilengkapi **akta pendirian badan hukum dan surat keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM** sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 pasal 33, Pemohon dapat menyerahkan perbaikan permintaan permohonan informasi publik dalam jangka **waktu paling lama 3 (tiga) hari** sejak surat keterangan tidak lengkap diterima pemohon informasi publik. Dalam hal pemohon informasi publik tidak menyerahkan perbaikan permintaan informasi publik yang diajukan, PPID memberikan catatan pada buku register permintaan informasi publik tanpa harus menindaklanjuti informasi publik yang diajukan.

Demikian untuk menjadikan periksa atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Dinas Pendidikan
Kota Semarang
Selaku PPID Pembantu

Drs. Ali Sofyan, M.M.

TEMBUSAN Kepada Yth,

1. Wali Kota Semarang (Sebagai Laporan);
2. Wakil Wali Kota Semarang (Sebagai Laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang (Sebagai Laporan);
4. Pertinggal.

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Dr. Wahidin No. 118, Jatingaleh, Candisari, Kota Semarang 50254
Telepon (024) 8412180, Posel disdik@semarangkota.go.id
Laman www.disdiksmg.semarangkota.go.id

Semarang, 18 Februari 2026

Nomor : B/4912/000.8.3.3/II/2026
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Permohonan Informasi LPKAN-RI

Yth.
Ketua Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Republik Indonesia
di -
SEMARANG

Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
d. Surat Permohonan Informasi Publik dari Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia nomor 212/Sek-Ber/Klarifikasi/02-2026 tanggal 2 Februari 2026 perihal Klarifikasi/Audiensi Terkait Pengadaan Barang dengan Anggaran Dana BOS dan Dana BOSP TA 2023-2025 yang ditujukan kepada Kepala SMP Negeri 22 Semarang.

Berkaitan dengan surat dari Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia pada huruf d di atas, berdasarkan SOP Dinas Pendidikan Kota Semarang nomor 067.2/SKR-UM-18/DISDIK/2025 tentang Permohonan Informasi Publik di Satuan Pendidikan, bahwa permohonan informasi publik pada satuan pendidikan ditujukan langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang selaku PPID Pembantu.

Berkaitan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 27 ayat 4, menyebutkan bahwa: "Permohonan Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia."

Sehubungan hal tersebut, permohonan informasi publik yang dikirim belum memenuhi persyaratan. Mohon dalam permohonan informasi publik saudara dengan nomor 212/Sek-Ber/Klarifikasi/02-2026, segera dilengkapi **akta pendirian badan hukum dan surat keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM** sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 pasal 33, Pemohon dapat menyerahkan perbaikan permintaan permohonan informasi publik dalam jangka **waktu paling lama 3 (tiga) hari** sejak surat keterangan tidak lengkap diterima pemohon informasi publik. Dalam hal pemohon informasi publik tidak menyerahkan perbaikan permintaan informasi publik yang diajukan, PPID memberikan catatan pada buku register permintaan informasi publik tanpa harus menindaklanjuti informasi publik yang diajukan.

Demikian untuk menjadikan periksa atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Dinas Pendidikan
Kota Semarang
Selaku PPID Pembantu

Drs. Ali Sofyan, M.M.

TEMBUSAN Kepada Yth,

1. Wali Kota Semarang (Sebagai Laporan);
2. Wakil Wali Kota Semarang (Sebagai Laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang (Sebagai Laporan);
4. Pertinggal.

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Dr. Wahidin No. 118, Jatingaleh, Candisari, Kota Semarang 50254
Telepon (024) 8412180, Posel disdik@semarangkota.go.id
Laman www.disdiksmg.semarangkota.go.id

Semarang, 18 Februari 2026

Nomor : B/4913/000.8.3.3/II/2026
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Permohonan Informasi LPKAN-RI

Yth.
Ketua Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Republik Indonesia
di -
SEMARANG

Dasar :
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
d. Surat Permohonan Informasi Publik dari Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia nomor 212/Sek-Ber/Klarifikasi/02-2026 tanggal 2 Februari 2026 perihal Klarifikasi/Audiensi Terkait Pengadaan Barang dengan Anggaran Dana BOS dan Dana BOSP TA 2023-2025 yang ditujukan kepada Kepala SMP Negeri 44 Semarang.

Berkaitan dengan surat dari Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia pada huruf d di atas, berdasarkan SOP Dinas Pendidikan Kota Semarang nomor 067.2/SKR-UM-18/DISDIK/2025 tentang Permohonan Informasi Publik di Satuan Pendidikan, bahwa permohonan informasi publik pada satuan pendidikan ditujukan langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang selaku PPID Pembantu.

Berkaitan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 27 ayat 4, menyebutkan bahwa: "Permohonan Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia."

Sehubungan hal tersebut, permohonan informasi publik yang dikirim belum memenuhi persyaratan. Mohon dalam permohonan informasi publik saudara dengan nomor 212/Sek-Ber/Klarifikasi/02-2026, segera dilengkapi **akta pendirian badan hukum dan surat keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM** sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 pasal 33, Pemohon dapat menyerahkan perbaikan permintaan permohonan informasi publik dalam jangka **waktu paling lama 3 (tiga) hari** sejak surat keterangan tidak lengkap diterima pemohon informasi publik. Dalam hal pemohon informasi publik tidak menyerahkan perbaikan permintaan informasi publik yang diajukan, PPID memberikan catatan pada buku register permintaan informasi publik tanpa harus menindaklanjuti informasi publik yang diajukan.

Demikian untuk menjadikan periksa atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Dinas Pendidikan
Kota Semarang
Selaku PPID Pembantu

Drs. Ali Sofyan, M.M.

TEMBUSAN Kepada Yth,

1. Wali Kota Semarang (Sebagai Laporan);
2. Wakil Wali Kota Semarang (Sebagai Laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang (Sebagai Laporan);
4. Pertinggal.

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Dr. Wahidin No. 118, Jatingaleh, Candisari, Kota Semarang 50254
Telepon (024) 8412180, Posel disdik@semarangkota.go.id
Laman www.disdiksmg.semarangkota.go.id

Semarang, 18 Februari 2026

Nomor : B/4914/000.8.3.3/II/2026
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Permohonan Informasi LPKAN-RI

Yth.
Ketua Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Republik Indonesia
di -
SEMARANG

Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
d. Surat Permohonan Informasi Publik dari Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia nomor 212/Sek-Ber/Klarifikasi/02-2026 tanggal 2 Februari 2026 perihal Klarifikasi/Audiensi Terkait Pengadaan Barang dengan Anggaran Dana BOS dan Dana BOSP TA 2023-2025 yang ditujukan kepada Kepala SMP Negeri 35 Semarang.

Berkaitan dengan surat dari Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia pada huruf d di atas, berdasarkan SOP Dinas Pendidikan Kota Semarang nomor 067.2/SKR-UM-18/DISDIK/2025 tentang Permohonan Informasi Publik di Satuan Pendidikan, bahwa permohonan informasi publik pada satuan pendidikan ditujukan langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang selaku PPID Pembantu.

Berkaitan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 27 ayat 4, menyebutkan bahwa: "Permohonan Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia."

Sehubungan hal tersebut, permohonan informasi publik yang dikirim belum memenuhi persyaratan. Mohon dalam permohonan informasi publik saudara dengan nomor 212/Sek-Ber/Klarifikasi/02-2026, segera dilengkapi **akta pendirian badan hukum dan surat keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM** sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 pasal 33, Pemohon dapat menyerahkan perbaikan permintaan permohonan informasi publik dalam jangka **waktu paling lama 3 (tiga) hari** sejak surat keterangan tidak lengkap diterima pemohon informasi publik. Dalam hal pemohon informasi publik tidak menyerahkan perbaikan permintaan informasi publik yang diajukan, PPID memberikan catatan pada buku register permintaan informasi publik tanpa harus menindaklanjuti informasi publik yang diajukan.

Demikian untuk menjadikan periksa atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Dinas Pendidikan
Kota Semarang
Selaku PPID Pembantu

Drs. Ali Sofyan, M.M.

TEMBUSAN Kepada Yth,

1. Wali Kota Semarang (Sebagai Laporan);
2. Wakil Wali Kota Semarang (Sebagai Laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang (Sebagai Laporan);
4. Pertinggal.

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Dr. Wahidin No. 118, Jatingaleh, Candisari, Kota Semarang 50254
Telepon (024) 8412180, Posel disdik@semarangkota.go.id
Laman www.disdiksmg.semarangkota.go.id

Semarang, 18 Februari 2026

Nomor : B/4915/000.8.3.3/II/2026
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Permohonan Informasi LPKAN-RI

Yth.
Ketua Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Republik Indonesia
di -
SEMARANG

Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
d. Surat Permohonan Informasi Publik dari Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia nomor 212/Sek-Ber/Klarifikasi/02-2026 tanggal 2 Februari 2026 perihal Klarifikasi/Audiensi Terkait Pengadaan Barang dengan Anggaran Dana BOS dan Dana BOSP TA 2023-2025 yang ditujukan kepada Kepala SMP Negeri 18 Semarang.

Berkaitan dengan surat dari Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia pada huruf d di atas, berdasarkan SOP Dinas Pendidikan Kota Semarang nomor 067.2/SKR-UM-18/DISDIK/2025 tentang Permohonan Informasi Publik di Satuan Pendidikan, bahwa permohonan informasi publik pada satuan pendidikan ditujukan langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang selaku PPID Pembantu.

Berkaitan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 27 ayat **4**, menyebutkan bahwa: "Permohonan Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia."

Sehubungan hal tersebut, permohonan informasi publik yang dikirim belum memenuhi persyaratan. Mohon dalam permohonan informasi publik saudara dengan nomor 212/Sek-Ber/Klarifikasi/02-2026, segera dilengkapi **akta pendirian badan hukum dan surat keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM** sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 pasal 33, Pemohon dapat menyerahkan perbaikan permintaan permohonan informasi publik dalam jangka **waktu paling lama 3 (tiga) hari** sejak surat keterangan tidak lengkap diterima pemohon informasi publik. Dalam hal pemohon informasi publik tidak menyerahkan perbaikan permintaan informasi publik yang diajukan, PPID memberikan catatan pada buku register permintaan informasi publik tanpa harus menindaklanjuti informasi publik yang diajukan.

Demikian untuk menjadikan periksa atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Dinas Pendidikan
Kota Semarang
Selaku PPID Pembantu

Drs. Ali Sofyan, M.M.

TEMBUSAN Kepada Yth,

1. Wali Kota Semarang (Sebagai Laporan);
2. Wakil Wali Kota Semarang (Sebagai Laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang (Sebagai Laporan);
4. Pertinggal.

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Dr. Wahidin No. 118, Jatingaleh, Candisari, Kota Semarang 50254
Telepon (024) 8412180, Posel disdik@semarangkota.go.id
Laman www.disdiksmg.semarangkota.go.id

Semarang, 18 Februari 2026

Nomor : B/4916/000.8.3.3/II/2026
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Permohonan Informasi LPKAN-RI

Yth.
Ketua Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Republik Indonesia
di -
SEMARANG

Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
d. Surat Permohonan Informasi Publik dari Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia nomor 212/Sek-Ber/Klarifikasi/02-2026 tanggal 2 Februari 2026 perihal Klarifikasi/Audiensi Terkait Pengadaan Barang dengan Anggaran Dana BOS dan Dana BOSP TA 2023-2025 yang ditujukan kepada Kepala SMP Negeri 41 Semarang.

Berkaitan dengan surat dari Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia pada huruf d di atas, berdasarkan SOP Dinas Pendidikan Kota Semarang nomor 067.2/SKR-UM-18/DISDIK/2025 tentang Permohonan Informasi Publik di Satuan Pendidikan, bahwa permohonan informasi publik pada satuan pendidikan ditujukan langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang selaku PPID Pembantu.

Berkaitan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 27 ayat 4, menyebutkan bahwa: "Permohonan Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia."

Sehubungan hal tersebut, permohonan informasi publik yang dikirim belum memenuhi persyaratan. Mohon dalam permohonan informasi publik saudara dengan nomor 212/Sek-Ber/Klarifikasi/02-2026, segera dilengkapi **akta pendirian badan hukum dan surat keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM** sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 pasal 33, Pemohon dapat menyerahkan perbaikan permintaan permohonan informasi publik dalam jangka **waktu paling lama 3 (tiga) hari** sejak surat keterangan tidak lengkap diterima pemohon informasi publik. Dalam hal pemohon informasi publik tidak menyerahkan perbaikan permintaan informasi publik yang diajukan, PPID memberikan catatan pada buku register permintaan informasi publik tanpa harus menindaklanjuti informasi publik yang diajukan.

Demikian untuk menjadikan periksa atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Dinas Pendidikan
Kota Semarang
Selaku PPID Pembantu

Drs. Ali Sofyan, M.M.

TEMBUSAN Kepada Yth,

1. Wali Kota Semarang (Sebagai Laporan);
2. Wakil Wali Kota Semarang (Sebagai Laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang (Sebagai Laporan);
4. Pertinggal.

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Dr. Wahidin No. 118, Jatingaleh, Candisari, Kota Semarang 50254
Telepon (024) 8412180, Posel disdik@semarangkota.go.id
Laman www.disdiksmg.semarangkota.go.id

Semarang, 18 Februari 2026

Nomor : B/4917/000.8.3.3/II/2026
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Permohonan Informasi LPKAN-RI

Yth.
Ketua Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Republik Indonesia
di -
SEMARANG

Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
d. Surat Permohonan Informasi Publik dari Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia nomor 212/Sek-Ber/Klarifikasi/02-2026 tanggal 2 Februari 2026 perihal Klarifikasi/Audiensi Terkait Pengadaan Barang dengan Anggaran Dana BOS dan Dana BOSP TA 2023-2025 yang ditujukan kepada Kepala SMP Negeri 24 Semarang.

Berkaitan dengan surat dari Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia pada huruf d di atas, berdasarkan SOP Dinas Pendidikan Kota Semarang nomor 067.2/SKR-UM-18/DISDIK/2025 tentang Permohonan Informasi Publik di Satuan Pendidikan, bahwa permohonan informasi publik pada satuan pendidikan ditujukan langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang selaku PPID Pembantu.

Berkaitan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 27 ayat 4, menyebutkan bahwa: "Permohonan Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia."

Sehubungan hal tersebut, permohonan informasi publik yang dikirim belum memenuhi persyaratan. Mohon dalam permohonan informasi publik saudara dengan nomor 212/Sek-Ber/Klarifikasi/02-2026, segera dilengkapi **akta pendirian badan hukum dan surat keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM** sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 pasal 33, Pemohon dapat menyerahkan perbaikan permintaan permohonan informasi publik dalam jangka **waktu paling lama 3 (tiga) hari** sejak surat keterangan tidak lengkap diterima pemohon informasi publik. Dalam hal pemohon informasi publik tidak menyerahkan perbaikan permintaan informasi publik yang diajukan, PPID memberikan catatan pada buku register permintaan informasi publik tanpa harus menindaklanjuti informasi publik yang diajukan.

Demikian untuk menjadikan periksa atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Dinas Pendidikan
Kota Semarang
Selaku PPID Pembantu

Drs. Ali Sofyan, M.M.

TEMBUSAN Kepada Yth,

1. Wali Kota Semarang (Sebagai Laporan);
2. Wakil Wali Kota Semarang (Sebagai Laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang (Sebagai Laporan);
4. Pertinggal.

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Dr. Wahidin No. 118, Jatingaleh, Candisari, Kota Semarang 50254
Telepon (024) 8412180, Posel disdik@semarangkota.go.id
Laman www.disdiksmg.semarangkota.go.id

Semarang, 18 Februari 2026

Nomor : B/4918/000.8.3.3/II/2026
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Permohonan Informasi LPKAN-RI

Yth.
Ketua Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Republik Indonesia
di -
SEMARANG

Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
d. Surat Permohonan Informasi Publik dari Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia nomor 212/Sek-Ber/Klarifikasi/02-2026 tanggal 9 Februari 2026 perihal Klarifikasi/Audiensi Terkait Pengadaan Barang dengan Anggaran Dana BOS dan Dana BOSP TA 2023-2025 yang ditujukan kepada Kepala SMP Negeri 16 Semarang.

Berkaitan dengan surat dari Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia pada huruf d di atas, berdasarkan SOP Dinas Pendidikan Kota Semarang nomor 067.2/SKR-UM-18/DISDIK/2025 tentang Permohonan Informasi Publik di Satuan Pendidikan, bahwa permohonan informasi publik pada satuan pendidikan ditujukan langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang selaku PPID Pembantu.

Berkaitan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 27 ayat 4, menyebutkan bahwa: "Permohonan Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia."

Sehubungan hal tersebut, permohonan informasi publik yang dikirim belum memenuhi persyaratan. Mohon dalam permohonan informasi publik saudara dengan nomor 212/Sek-Ber/Klarifikasi/02-2026, segera dilengkapi **akta pendirian badan hukum dan surat keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM** sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 pasal 33, Pemohon dapat menyerahkan perbaikan permintaan permohonan informasi publik dalam jangka **waktu paling lama 3 (tiga) hari** sejak surat keterangan tidak lengkap diterima pemohon informasi publik. Dalam hal pemohon informasi publik tidak menyerahkan perbaikan permintaan informasi publik yang diajukan, PPID memberikan catatan pada buku register permintaan informasi publik tanpa harus menindaklanjuti informasi publik yang diajukan.

Demikian untuk menjadikan periksa atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Dinas Pendidikan
Kota Semarang
Selaku PPID Pembantu

Drs. Ali Sofyan, M.M.

TEMBUSAN Kepada Yth,

1. Wali Kota Semarang (Sebagai Laporan);
2. Wakil Wali Kota Semarang (Sebagai Laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang (Sebagai Laporan);
4. Pertinggal.

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Tambak Aji Raya No. 5 Telp./Fax.(024) 8662389 Kode Pos 50185 Semarang
Email: dishub@semarangkota.go.id Website : www.dishub.semarangkota.go.id

Nomor : B/9467 /700/VIII/2026 Semarang, 31 Agustus 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Jawaban atas Surat Permintaan Klarifikasi

Yth. Ketua Lembaga Etika Transparansi Rakyat (LENTERA)
di –
SEMARANG

Dasar :
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
d. Surat Lembaga Etika Transparansi Rakyat (LENTERA) Nomor 018/SM/LENTERA/VIII/2026 tanggal 18 Agustus 2026 perihal Permintaan Klarifikasi dan Pertanggungjawaban atas Temuan Pemeriksaan BPK RI terkait Pembayaran BPJS dan Pengelolaan Biaya Operasional Trans Semarang Tahun Anggaran 2024 s.d. Oktober 2025.

Pertama-tama, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Lembaga Etika Transparansi Rakyat (LENTERA) atas perhatian, kepedulian, serta partisipasinya dalam turut mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sebagai salah satu lembaga masyarakat yang selama ini turut memberikan perhatian terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, kami memandang keberadaan dan masukan dari LENTERA sebagai bagian dari kontrol sosial yang konstruktif. Berbagai perhatian, pertanyaan, maupun permintaan klarifikasi yang disampaikan kepada Dinas Perhubungan Kota Semarang pada prinsipnya dapat menjadi masukan bagi kami untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam penyelenggaraan layanan Trans Semarang.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 018/SMLENTERA/VIII/2026 tanggal 18 Agustus 2026 perihal *Permintaan Klarifikasi dan Pertanggungjawaban atas Temuan Pemeriksaan BPK RI terkait Pembayaran BPJS dan Pengelolaan Biaya Operasional Trans Semarang Tahun Anggaran 2024 s.d. Oktober 2025*, kami telah melakukan

pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi permohonan informasi yang disampaikan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, terdapat beberapa persyaratan administrasi yang masih perlu dilengkapi agar permohonan informasi dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, khususnya ketentuan mengenai persyaratan permohonan informasi publik oleh badan hukum, pemohon perlu melengkapi dokumen pendukung yang dipersyaratkan, antara lain dokumen yang menunjukkan kedudukan dan legalitas badan hukum yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Saudara dapat melengkapi persyaratan administrasi permohonan informasi publik khususnya berupa **fotokopi akta pendirian badan hukum** yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta surat keterangan dari Kementerian Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kami berharap kelengkapan dokumen tersebut dapat segera disampaikan sehingga permohonan informasi yang diajukan oleh LENTERA dapat kami proses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan ketentuan layanan informasi publik yang berlaku.

Demikian kami sampaikan sebagai bentuk tindak lanjut atas surat Saudara. Terima kasih atas perhatian, kepedulian, serta kontribusi LENTERA dalam turut mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin baik di Kota Semarang. Atas kerja sama dan pengertiannya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PERHUBUNGAN

Danang Kurniawan, S.H.
Pembina/IV-a
NIP 198003202010011001

Tembusan:
1. Kepala BLU UPTD Trans Semarang.